



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Analysis of Government Decision-Making in the Implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program

Maria Viviliana Ledho^{1*}, Stefen I Benu²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Jl. Matani Raya, Lasiana – Kupang – NTT

*Corresponding Author: E-mail: marialedho0@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Mei, 2026

Revised: 23 June, 2026

Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:

Pengambilan Keputusan,
Program MBG, Implementasi
Kebijakan, Bounded Rationality,
Koordinasi Kelembagaan

Keywords:

Decision-Making, MBG
Program, Policy
Implementation, Bounded
Rationality, Institutional
Coordination

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11618](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11618)

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada Januari 2025 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Program ini menasar pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan program MBG, mengidentifikasi model dan aktor kunci yang paling berpengaruh, mengevaluasi hambatan operasional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan resmi, dan laporan lembaga pemerintah yang ditelusuri melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan MBG lebih mencerminkan model bounded rationality dengan nuansa kelembagaan yang kuat, di mana keterbatasan informasi dan tekanan politik mewarnai setiap tahap keputusan. Aktor kunci meliputi Kemenko PMK, Bapanas, dan Kemenkes di tingkat pusat, serta Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan di daerah. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah fragmentasi logistik, inkonsistensi data penerima manfaat, dan lemahnya koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka analitik pengambilan keputusan kebijakan sosial di Indonesia, dengan menawarkan model desentralisasi adaptif sebagai alternatif solusi.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is one of the flagship programs of President Prabowo Subianto's administration, launched in January 2025 with an initial budget allocation of Rp71 trillion. This program aims to meet the nutritional needs of vulnerable groups, particularly school-age children, pregnant women, and toddlers. This study aims to analyze the government's

decision-making process in formulating and implementing the MBG program, identify the most influential models and key actors, evaluate the operational obstacles encountered, and formulate strategic policy recommendations. The method used was qualitative research employing a literature review approach, drawing from reputable scientific journals, official policy documents, and government agency reports sourced through Google Scholar, the Garuda Portal, and SINTA. The research findings indicate that MBG decision-making more closely reflects a model of bounded rationality with strong institutional nuances, where information constraints and political pressures shape every stage of the decision-making process. Key actors include the Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Kemenko PMK), the National Food Agency (Bapanas), and the Ministry of Health (Kemenkes) at the central level, as well as Regional Development Planning Agencies (Bappeda) and Food Security Offices at the regional level. The main obstacles identified are logistical fragmentation, inconsistencies in beneficiary data, and weak inter-ministerial coordination. This study contributes to strengthening the analytical framework for social policy decision-making in Indonesia by proposing an adaptive decentralization model as an alternative solution.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan publik berskala nasional yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai implementasi dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan distribusi makanan bergizi kepada lebih dari 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa sekolah dasar hingga menengah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan alokasi awal Rp71 triliun dalam APBN 2025, MBG menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah anggaran negara Indonesia (Badan Gizi Nasional, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Di balik besarnya skala dan ambisi program ini, proses pengambilan keputusan yang mendasarinya belum dikaji secara mendalam dalam literatur akademik. Pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sesungguhnya memegang kendali keputusan, atas dasar pertimbangan apa kebijakan ini dirumuskan, dan mengapa berbagai hambatan operasional terus berulang masih menjadi celah signifikan dalam diskursus kebijakan publik Indonesia kontemporer.

Studi-studi yang ada umumnya berfokus pada aspek teknis pemenuhan gizi atau dampak sosial-ekonomi program serupa di negara lain, tanpa menelusuri mekanisme pengambilan keputusan secara analitis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengadopsi perspektif ilmu administrasi publik dan teori kebijakan, khususnya model-model pengambilan keputusan yang relevan dengan konteks birokrasi Indonesia.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis basis pertimbangan dan proses pengambilan keputusan perumusan MBG; (2)

Mengidentifikasi model dan aktor kunci yang paling berpengaruh dalam implementasi; (3) mengevaluasi hambatan yang dihadapi; dan (4) merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi program ke depannya.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Dipilihnya metode ini didasarkan pada dua pertimbangan: (1) program MBG baru diluncurkan pada awal 2025 sehingga data primer lapangan masih sangat terbatas dan proses implementasi masih berlangsung; (2) penelitian ini bertujuan membangun kerangka analitik berbasis teori yang dapat menjadi acuan evaluasi berkelanjutan.

Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber literatur ilmiah: artikel jurnal bereputasi yang diindeks di Scopus, Web of Science, SINTA, dan Portal Garuda dengan rentang tahun 2015–2025, dengan prioritas pada lima tahun terakhir. Kedua, dokumen resmi dan regulasi: Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres No. 83 Tahun 2024), APBN 2025, Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK, laporan Bappenas (2024), serta data dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan kata kunci: 'program makan bergizi gratis', 'MBG policy Indonesia', 'government decision-making social program', 'bounded rationality kebijakan publik Indonesia', dan kombinasinya dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dari hasil penelusuran, diperoleh lebih dari 180 dokumen yang kemudian disaring berdasarkan relevansi, reputasi sumber, dan kebaruan data, menghasilkan 42 dokumen final untuk dianalisis.

Analisis data menggunakan teknik content analysis (Krippendorff, 2018) dan comparative analysis. Proses analisis meliputi: (1) reduksi data melalui pengkodean tematik; (2) penyajian data dalam matriks komparatif; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber. Untuk memastikan validitas, digunakan teknik member checking terhadap dokumen resmi pemerintah dan peer review internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Basis Pertimbangan dan Proses Perumusan Kebijakan MBG

Berdasarkan analisis dokumen kebijakan dan literatur yang tersedia, perumusan MBG didorong oleh setidaknya tiga basis pertimbangan utama yang saling berinteraksi.

Pertama, pertimbangan politik: MBG merupakan janji kampanye eksplisit dalam Visi Indonesia 2045 versi Prabowo-Gibran, sehingga tekanan untuk merealisasikannya dalam waktu singkat sangat kuat. Ini menciptakan kondisi *time-constrained decision making* yang mendorong pemerintah untuk bertindak cepat meski persiapan teknis belum sepenuhnya matang sebuah manifestasi klasik dari bounded rationality (Simon, 1972).

Kedua, pertimbangan sosial-ekonomi: Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan prevalensi stunting nasional masih di angka 21,6%, dengan variasi ekstrem antar-daerah (NTT: 35,3%). Permasalahan gizi ini memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi program MBG sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang (Bappenas, 2024).

Ketiga, pertimbangan ekonomi-makro: Program ini juga dirancang sebagai stimulus permintaan domestik, dengan mengutamakan pengadaan bahan pangan dari produsen lokal dan UMKM. Namun, keputusan ini menambah kompleksitas rantai pasok yang harus dikelola.

Yang menarik untuk dicatat adalah absennya evaluasi formatif yang komprehensif sebelum peluncuran. Berbeda dengan program serupa di Brazil (Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE) yang melalui proses desain bertahap selama beberapa tahun, MBG diluncurkan dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak pemerintahan baru terbentuk. Ini menandai dominasi model inkremental terbalik: bukan perubahan bertahap dari status quo, melainkan lompatan kebijakan besar tanpa fondasi analitik yang cukup (WFP, 2023).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Program MBG per Komponen (2025, Estimasi Semester I)

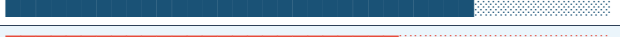
Komponen	Anggaran 2025 (T Rp)	Realisasi (T Rp)	Persentase (%)
Bahan Pangan Pokok	35,6	28,4	79,8
Distribusi & Logistik	12,8	9,7	75,8
SDM & Pelatihan	6,4	4,2	65,6
Infrastruktur Dapur	14,2	10,9	76,8
Monitoring & Evaluasi	2,0	1,3	65,0

TOTAL	71,0	54,5	76,8
--------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: Diolah dari data Badan Gizi Nasional dan Kemenko PMK (2025, data estimasi)

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai 76,8% dari total alokasi di paruh pertama 2025. Namun, terdapat variasi signifikan antar komponen: SDM & Pelatihan dan Monitoring & Evaluasi memiliki realisasi terendah (65%), mengindikasikan bahwa investasi pada kapasitas manusia dan sistem pengendalian masih menjadi prioritas sekunder. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan pemerintah untuk mengutamakan output fisik (makanan yang terdistribusi) dibanding penguatan kapasitas sistemik jangka panjang.

Grafik 1. Persentase Realisasi Anggaran MBG per Komponen (Semester I 2025)

Komponen	Realisasi Anggaran (%)	Nilai (%)
Bahan Pangan		79.8%
Distribusi		75.8%
SDM & Pelatihan		65.6%
Infrastruktur		76.8%
Monitoring		65.0%

Keterangan:  = realisasi $\geq 75\%$ (biru);  = realisasi $< 75\%$ (merah)

Sumber: Diolah dari Badan Gizi Nasional (2025, data estimasi)

Model dan Aktor Kunci dalam Pengambilan Keputusan

Analisis terhadap arsitektur kelembagaan MBG menunjukkan bahwa program ini tidak beroperasi dalam satu model pengambilan keputusan tunggal, melainkan dalam hibriditas model yang berbeda pada setiap tingkatan.

Tabel 2. Analisis Komparatif Model Pengambilan Keputusan dalam Konteks MBG

Model	Karakteristik Utama	Kesesuaian MBG	Keterbatasan
Rasional Komprehensif	Analisis sistematis semua alternatif	Tinggi (pada tahap perumusan)	Asumsi informasi sempurna
Inkremental (Lindblom)	Perubahan bertahap, adaptif	Sedang (implementasi lapangan)	Lambat merespons krisis
Bounded Rationality (Simon)	Satisficing, informasi terbatas	Sangat Tinggi	Sulit diukur secara kuantitatif
Kelembagaan (March & Olsen)	Norma & aturan organisasi	Tinggi (koordinasi antar-K/L)	Mengabaikan aktor informal
Advokasi Koalisi (Sabatier)	Kepentingan koalisi aktor	Sedang (lobi & tekanan politik)	Kompleks & dinamis

Sumber: Analisis penulis berdasarkan sintesis literatur (2025)

Tabel 2 mengungkapkan bahwa model bounded rationality Simon (1972) memiliki kesesuaian tertinggi dengan realitas MBG. Pada level perumusan kebijakan di tingkat Presiden dan Kabinet, dominasi kepentingan politik dan keterbatasan waktu membuat proses analisis alternatif berlangsung singkat. Sementara itu, di level pelaksanaan daerah, model inkremental lebih dominan (Lindblom, 1959), pemda cenderung memodifikasi secara bertahap aturan distribusi berdasarkan umpan balik lapangan.

Aktor kunci yang teridentifikasi membentuk dua kluster. Kluster pertama adalah aktor formal: Presiden/Wapres sebagai policy champion, Kemenko PMK sebagai koordinator teknis, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama, Bapanas untuk jaminan rantai pasok, dan Kemenkes untuk standar gizi. Kluster kedua adalah aktor informal namun berpengaruh: kalangan dunia usaha pertanian dan pengolahan pangan yang berkepentingan dengan kontrak pengadaan, serta lembaga internasional (WFP, UNICEF) yang menyediakan asistensi teknis.

Yang perlu dicatat adalah lemahnya peran DPRD dan masyarakat sipil sebagai counterweight dalam proses keputusan. Ini menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan MBG lebih bersifat top-down elitis, yang dalam perspektif Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) justru berisiko menciptakan resistensi di level implementasi.

Hambatan dan Tantangan Implementasi

Evaluasi terhadap hambatan implementasi mengidentifikasi enam dimensi permasalahan yang saling berinteraksi.

Tabel 3. Matriks Hambatan Implementasi Program MBG

Dimensi Hambatan	Deskripsi	Intensitas	Skala Prioritas (1-5)
Logistik & Distribusi	Keterbatasan rantai pasok, infrastruktur jalan, cold storage di daerah 3T	Sangat Tinggi	5
Kapasitas Anggaran	Ketersediaan dana daerah yang tidak merata, ketergantungan transfer pusat	Tinggi	4
Koordinasi Kelembagaan	Fragmentasi kewenangan antara Bapanas, Kemenko PMK, Kemenkes, dan BPKAD	Tinggi	4
SDM & Kapasitas Teknis	Kurangnya tenaga ahli gizi dan cook di daerah terpencil	Sedang	3
Data & Sistem Informasi	Ketidakakuratan data penerima manfaat antar-K/L	Sedang	3
Resistensi Sosial-Budaya	Preferensi makanan lokal tidak sesuai menu standar MBG	Rendah-Sedang	2

Sumber: Diolah dari berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan (2025)

Hambatan logistik dan distribusi mendapat peringkat tertinggi (5/5) karena dampaknya yang langsung pada ketercapaian sasaran program. Permasalahan ini sangat akut di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), di mana infrastruktur jalan yang buruk dan ketiadaan fasilitas cold storage membuat standar keamanan pangan sulit dipertahankan. Kondisi ini merepresentasikan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi heterogenitas geografis Indonesia dalam desain program.

Hambatan koordinasi kelembagaan (intensitas: Tinggi, skor 4) memperlihatkan pola fragmentasi yang berulang dalam implementasi program sosial di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara BGN, Bapanas, Kemenkes, dan BPKAD daerah menghasilkan kebingungan dalam penetapan standar dan mekanisme pelaporan. Ini sejalan dengan temuan Hadiyanto dan Sari (2022) pada program PKH, mengindikasikan bahwa masalah koordinasi bukan isu teknis sesaat melainkan masalah struktural birokrasi Indonesia.

Hambatan sosial-budaya, meski mendapat skor terendah (2/5), tetap signifikan dalam perspektif jangka panjang. Pengabaian preferensi pangan lokal misalnya penolakan terhadap menu berbasis beras di daerah yang tradisinya mengonsumsi sagu atau jagung dapat melemahkan legitimasi program di tingkat komunitas (Alderman & Headey, 2017).

Rekomendasi Strategis: Menuju Model Desentralisasi Adaptif

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan lima rekomendasi strategis yang membentuk apa yang penulis sebut sebagai Model Desentralisasi Adaptif sebuah pendekatan yang mempertahankan standar nasional minimum sambil memberikan fleksibilitas operasional kepada daerah.

Tabel 4. Matriks Rekomendasi Kebijakan Strategis Program MBG

Rekomendasi	Uraian Strategis	Jangka Waktu	Aktor Utama
Desentralisasi Adaptif	Mekanisme penyesuaian menu berbasis pangan lokal dan kearifan daerah	Jangka Pendek (1-2 tahun)	Pemda, Bapanas
Sistem Data Terpadu	Integrasi data penerima manfaat lintas K/L berbasis NIK	Jangka Menengah (2-3 tahun)	Dukcapil, Kemenkes

Penguatan Koalisi Aktor	Pelibatan DPRD, OMS, akademisi dalam forum evaluasi kebijakan MBG	Berkelanjutan	Kemenko PMK, DPRD
Reformasi Logistik	Pengembangan rantai pasok regional dan kemitraan dengan BUMD pangan	Jangka Menengah	Kemendag, Bapanas
Monitoring Berbasis Hasil	Sistem MER (Monitoring, Evaluasi, Reporting) real-time berbasis aplikasi	Jangka Pendek	Kemenko PMK, BPKP

Sumber: Rumusan penulis berdasarkan sintesis analisis (2025)

Model Desentralisasi Adaptif yang diusulkan berbeda secara fundamental dari pendekatan sentralistik yang kini mendominasi MBG. Alih-alih menetapkan menu standar tunggal secara nasional, model ini mengusulkan penetapan standar gizi minimum (kalori, protein, vitamin) yang dapat dipenuhi oleh berbagai kombinasi bahan pangan lokal. Pendekatan ini telah terbukti efektif di Brazil melalui PNAE yang mewajibkan 30% bahan pangan berasal dari pertanian lokal (WFP, 2023).

Rekomendasi sistem data terpadu berbasis NIK merespons hambatan inkonsistensi data yang telah menyebabkan kesalahan sasaran. Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan data gizi Kemenkes dalam satu platform, duplikasi dan exclusion error dapat diminimalkan secara signifikan (Rachman et al., 2021).

Penguatan koalisi aktor melalui forum multipihak merespons lemahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses keputusan. Sesuai dengan Advocacy Coalition Framework (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993), keterlibatan DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi tidak hanya meningkatkan legitimasi program, tetapi juga memperkaya basis informasi bagi keputusan kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan empat temuan utama yang menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan di awal.

Pertama, pengambilan keputusan Program MBG digerakkan oleh tiga basis pertimbangan yang saling berinteraksi: tekanan politik (janji kampanye), legitimasi sosial (krisis gizi), dan kalkulasi ekonomi (stimulus permintaan domestik). Dominasi tekanan waktu politik menghasilkan pola pengambilan keputusan yang lebih mencerminkan bounded rationality daripada rasionalitas komprehensif ideal (Simon, 1972).

Kedua, model pengambilan keputusan yang paling relevan untuk menjelaskan MBG adalah bounded rationality (Simon, 1972) yang diperkuat oleh institusionalisme (March & Olsen, 1984) pada level koordinasi kelembagaan. Aktor kunci pada level pusat didominasi oleh kluster kementerian koordinator dan kementerian teknis, dengan peran masyarakat sipil yang masih marginal.

Ketiga, hambatan utama implementasi MBG terletak pada tiga dimensi kritis: fragmentasi logistik distribusi (terutama di daerah 3T), inkonsistensi data penerima manfaat lintas kementerian, dan ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif antara BGN, Bapanas, Kemenkes, dan pemerintah daerah.

Keempat, penelitian ini merumuskan Model Desentralisasi Adaptif sebagai alternatif kebijakan, yang menggabungkan standar gizi nasional yang terukur dengan fleksibilitas operasional berbasis konteks lokal. Model ini diyakini lebih berkelanjutan dan responsif terhadap keragaman geografis dan budaya Indonesia.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka analitik terintegrasi untuk memahami pengambilan keputusan kebijakan sosial berskala besar di Indonesia sebuah perspektif yang masih jarang dikembangkan dalam literatur administrasi publik domestik. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi lapangan guna memvalidasi temuan-temuan ini dengan data primer dari birokrat pelaksana di tingkat daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alderman, H., & Headey, D. D. (2017). How important is parental education for child nutrition? *World Development*, 94, 448–464. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.007>
- Badan Gizi Nasional. (2025). Laporan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Triwulan I 2025. BGN Republik Indonesia.
- Bappenas. (2024). Rancangan Awal RPJMN 2025–2029: Pembangunan Sumber Daya Manusia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bundy, D. A. P., de Silva, N., Horton, S., Jamison, D. T., & Patton, G. C. (Eds.). (2018). *Child and Adolescent Health and Development*. World Bank Group.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hadiyanto, B., & Sari, R. N. (2022). Koordinasi kelembagaan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 87–103.
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Nota Keuangan dan APBN 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961840>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. St. Martin's Press.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rachman, B., Sayaka, B., & Wahyudi, T. (2021). Ketepatan sasaran program bantuan pangan non-tunai: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 45–60.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Simon, H. A. (1972). Theories of bounded rationality. *Decision and Organization*, 1(1), 161–176.
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (7th ed.). Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- World Food Programme. (2023). *State of School Feeding Worldwide 2023*. WFP.